

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejarah Negara Indonesia yang sudah mengalami pasang surut terutama dalam konteks pemilihan sistem politik yang paling kompatibel untuk diterapkan, sejarah mencatat bahwa bangsa ini pernah menerapkan demokrasi terpimpin pada era Soekarno pada tahun 1959-1965 dan era Demokrasi Pancasila sebagai asas tunggal pada era Soeharto pada tahun 1966-1998 kedua pemimpin tersebut mengingkarkan diri sebagai pemimpin tunggal yang kuat yang sangat menguasai cabang-cabang kekuasaan baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif (Zuhro, 2018). terutama pengalaman pemerintah yang sarat eksekutif yang cukup lama selama 32 tahun rezim orde baru berkuasa yang menyebabkan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk membatasi masa kekuasaan presiden dan mencabut kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menentukan Presiden maupun Wakil Presiden dan menggantinya dengan sistem pemilihan umum secara langsung oleh rakyat untuk memperkuat demokrasi sebagai bagian dari adanya reformasi pada 1998.

Reformasi pada tahun 1998 dari rezim otoritarianisme menuju rezim demokrasi harusnya wajib membawa perubahan-perubahan yang positif bagi masyarakat. Tujuan Negara Kesejahteraan adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun kemajuan demokrasi selama era reformasi belum memenuhi harapan masyarakat, terutama masyarakat bawah atau akar rumput, yang terus menghadapi masalah seperti kemiskinan, kesulitan mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan yang layak, serta perbedaan yang terus ada masyarakat antara kelas atas dan masyarakat bawah. Singkatnya, demokrasi Indonesia pada era reformasi masih bersifat prosedural yaitu hanya dianggap sebagai proses elektoral dan suksesi kepemimpinan. Namun, jika demokrasi diterjemahkan ke dalam hal-hal yang lebih penting seperti penegakan hukum, partisipasi publik, fungsionalisasi Trias Politika dengan baik, keadilan gender, dan kohesivitas masyarakat dengan pemerintah, akan ada perbedaan yang cukup besar (Anugerah & Endiartia, 2018).

Bila menggunakan terminologi David Easton dalam (Ghulam Dzunuwanus, 2016) demokrasi itu bagaikan sebuah sistem dan mesin yang bekerja bersama sama yang terdiri atas prasyarat/ lingkungan, input, output dan outcome. Prasyarat atau lingkungan adalah kondisi awal yang mendukung terlaksananya demokrasi seperti infrastruktur regulasi yang didukung penegakan hukum, modal sosial (kepercayaan, gotong royong dan toleransi) serta kesamaan visi misi memandang demokrasi sebagai pencapaian tujuan yang utama, input adalah masukan yang berupa dukungan atau tuntutan, input dalam konteks sistem demokrasi yaitu dukungan suara masyarakat kepada calon pejabat dalam sistem pemilu, output adalah tindakan atau kebijakan setelah pejabat tersebut terpilih sementara itu outcomes adalah hasil dari kebijakan tersebut apakah sudah menghasilkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat luas dalam jangka panjang.

Sementara itu berkaitan dengan welfare state diasumsikan sebagai kehadiran negara terhadap kesejahteraan warganya, menurut Encyclopedia Britannica, didefinisikan sebagai ide tentang pemerintahan di mana negara memainkan peran penting dalam menghadirkan keadilan ekonomi dan sosial warganya terutama layanan dasar yang sangat penting seperti jaminan pendidikan, jaminan kesehatan jaminan pensiun dan semacamnya (Alfitri, 2012).

Pemahaman setiap orang dan negara mengenai welfare state sangat berbeda dan bermacam macam seperti pelayanan sosial di Inggris, Selandia Baru, dan Australia layanan sosial biasanya terdiri dari lima jenis jaminan sosial, yaitu keamanan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pelayanan sosial personal. Di United States, tunjangan sosial diberikan kepada orang miskin karena mayoritas penerima manfaatnya adalah orang miskin atau cacat pengangguran, dampaknya menimbulkan konotasi yang kurang baik pada istilah kesejahteraan seperti ketergantungan dan yang tidak kalah penting untuk mewujudkan negara kesejahteraan dibutuhkan lembaga atau institusi baik yang dibentuk oleh negara maupun lembaga sosial masyarakat yang dibentuk secara mandiri.

Dalam konteks Indonesia pemberlakuan demokrasi belum pernah berkelanjutan secara substansial baik di rezim orde lama maupun orde baru kehadiran masa reformasi ini diharapkan mampu merevitalisasi demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik secara prosedural maupun substansial. Menurut Randy dalam (Zaini, 2019) terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam upaya menggunakan demokrasi sebagai prinsip universal dalam kehidupan nasional untuk mencapai tujuan utamanya yaitu kesejahteraan masyarakat. pertama adalah tahap pra-kondisi di

mana suatu bangsa menerapkan asumsi dasar tentang pentingnya demokrasi dan bagaimana kita menerapkannya. Pada tahap ini, masyarakat masih perlu belajar bagaimana menerapkan demokrasi kedua tahap transisi menuju demokrasi terjadi ketika suatu negara atau bangsa membuat pembiasaan tentang model demokrasi. Sebagian besar warga mengalami perubahan pendapat setelah mengetahui tentang demokrasi. Pada tahap ini, pemerintah diharapkan untuk membuat komponen dan sistem bekerja sama dengan berbagai pihak dengan nilai nilai damai.

Ketiga tahap pembakuan nilai demokrasi dimulai dengan pembentukan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, yang menyiapkan sarana untuk menjalankan demokrasi dan, yang paling penting, menyediakan institusi hukum dan sistem penegakan hukum yang diperlukan untuk demokrasi yang berkeadilan. Dalam tahap keempat penegakan hukum sangat penting dalam demokrasi. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat bekerja sama untuk membantu rakyat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat harus proaktif dan responsif dalam mendampingi rakyat dalam pemenuhan hak-hak mereka dan memberi mereka pemahaman tentang kewajiban mereka agar kehidupan berbangsa dapat berjalan secara damai dan Tahap kelima adalah kesejahteraan masyarakat semua orang yang sadar akan hak dan kewajibannya dilaksanakan. dalam koridor hukum yang seimbang antara kegiatan ekonomi dan politik. Setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk memilih apa yang mereka inginkan, asalkan mereka diberi peluang dan fasilitas yang sama untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Dari penjelasan tahap demokrasi di atas, penulis mengatakan bahwa meskipun mereka telah berhasil melewati tahap pertama hingga ketiga, mereka belum berhasil melewati tahap keempat dan kelima, yaitu penegakan hukum dan kesejahteraan sosial. Hal ini disebabkan oleh ketidakefektifan institusi negara yang bertanggung jawab atas politik dan kebijakan ekonomi untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh pendapatan yang layak.

Untuk menghasilkan sistem demokrasi yang rasional, secara kodrati, Demokrasi harus dibangun di atas logika dan moralitas. sebagaimana dinyatakan oleh Noam Chomsky, mengatakan bahwa teori pasar bebas yang tidak berhati-hati hanya akan meningkatkan ketamakan yang dihasilkan dari demokrasi pemilihan (Purwanto & Syawie, 2012). Namun, perlu diwaspadai bahwa ada kecenderungan yang bertentangan di mana demokrasi pilihan rakyat berkembang sementara kebebasan dan kesejahteraan warga negara stagnan. Kecenderungan ini

menunjukkan terjadinya kedangkalan demokrasi, yaitu situasi yang sangat kontradiktif di mana negara cenderung gagal memanfaatkan demokrasi pilihan rakyat yang menghasilkan pemerintahan yang dilegitimasi tetapi tidak efektif dan korup.

Kesuksesan modernisasi politik di Indonesia sejak 1998 memang telah mendapat pengakuan global sistem electoral secara demokratis telah dilakukan melalui pemilihan umum untuk memperoleh kewenangan paling tidak Indonesia sudah empat kali pemilu yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 walaupun masih ada yang dikritisi yang menghasilkan pemerintahan yang mendapat kepercayaan namun pada realitanya Indonesia pun harus mengalami konsekuensi akibat dari demokrasi yang tidak hati hati cenderung berhasil secara prosedural namun di sisi lain belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2011-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persen (%)
2011	30,01 juta	12,36
2012	28,71 juta	11,66
2013	28,60 juta	11,46
2014	27,73 juta	10,96
2015	28,51 juta	11,13
2016	27,76 juta	10,70
2017	26,58 juta	10,12
2018	25,67 juta	9,66
2019	24,78 juta	9,22
2020	27,55 juta	10,19
2021	26,50 juta	9,71
Maret 2022	26,16 juta	9,54
Sept 2022	26,36 juta	9,57
Maret 2023	25,90 juta	9,36

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Data kemiskinan tersebut memang menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang relatif stabil meskipun terjadi peningkatan angka kemiskinan yang terjadi pada tahun 2020 karena

terjadi pembatasan aktivitas ke luar rumah akibat adanya wabah covid 19. Meskipun begitu penurunan angka kemiskinan tersebut tetaplah harus kita kritisi dengan lebih cermat karena belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang optimal misalnya saja garis kemiskinan berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik Maret 2023 yaitu sebesar Rp 550,468 per kapita per bulan naik 2,87 persen jika dibandingkan september 2022. Menurut penulis garis kemiskinan tersebut belum mencerminkan tingkat kesejahteraan di masyarakat bila mencermati data terbaru BPS garis kemiskinan di tiga provinsi di pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur angka garis kemiskinan rumah tangga ada dikisaran kurang dari 2 juta perbulan dengan rata rata anggota rumah tangga empat sampai lima orang sementara itu garis kemiskinan rumah tangga tertinggi di pulau jawa ada di provinsi DKI Jakarta dengan angka 3,875,398 per bulan, tentu saja ini adalah sebuah anomali garis kemiskinan rumah tangga di tiga provinsi di pulau jawa dengan penduduk terbanyak masih memiliki garis kemiskinan rumah tangga yang cukup rendah kurang dari 2 juta rupiah padahal disatu sisi pulau jawa adalah penyumbang terbesar dalam perekonomian indonesia sampai saat ini yaitu lebih dari lima puluh persen memang masih ada provinsi DKI Jakarta dengan angka garis kemiskinan rumah tangga yang lebih baik dikisaran 3 juta per bulan tapi perlu diingat bahwa DKI Jakarta adalah pusat segala perekonomian yang telah maju dalam industri, perdagangan dan lain lain menurut penulis garis kemiskinan rumah tangga tersebut juga tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya karena dalam anggota rumah tangga tersebut masih ada yang belum bekerja atau tidak bekerja seperti anak anak dan seorang ibu yang tidak bekerja atau bekerja tapi tidak punya penghasilan yang memadai.

Dalam data Badan Pusat Statistik tersebut penyumbang garis kemiskinan masyarakat Indonesia masih disumbang sebagian besar oleh komoditas makanan sebesar lebih dari 70% baik yang ada di kota maupun desa seperti beras, rokok kretek filter, telur ayam daging ayam mie instan, kopi bubuk sementara sisanya disumbang oleh komoditas bukan makanan seperti perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan lain lain. Ini juga yang pernah dikritisi oleh ekonom Bhima Yudhistira pada saat angka kemiskinan turun hingga 1 digit pada tahun 2018 yang disebut pemerintah telah mengukir sejarah yaitu sebesar 9,22% bahwa masyarakat masih sangat sensitif akan kenaikan harga pangan dan energi yang dapat menyebabkan masyarakat akan kembali masuk ke dalam jurang kemiskinan (BBC News, 2018). Ekonom lainnya Faisal Basri juga menjabarkan bahwa 143 Juta atau 53% masyarakat Indonesia masih rentan miskin karena

masih tergantung pada harga kebutuhan pangan yang setiap saat bisa naik seperti beras cabai telur dan juga karena struktur UMKM yang tidak sehat karena didominasi oleh usaha mikro sebanyak 65 juta unit (Prataama, 2021). Bank Dunia juga menjabarkan masih ada 115 juta penduduk yang rentan miskin walaupun bank dunia juga memuji pengentasan kemiskinan Indonesia yang berkembang pesat sejak tahun 1990 an (News CNBC Indonesia, 2020).

Data selanjutnya adalah tingkat pengeluaran atau gini ratio yang masih didominasi oleh 20 persen penduduk teratas ini ditunjukkan dengan data tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk per September 2021 yaitu 20 persen penduduk teratas sebesar 45,71 persen, 40 persen penduduk kelas menengah menyumbang 36,32 persen dan 40 persen penduduk terbawah hanya menyumbang 17,91 (BPS, 2021). Walaupun rasio gini terus mengalami penurunan yang stabil sejak september 2015 hingga september 2021 yang mencapai 0,381 tapi perlu diingat bahwa rasio gini juga belum mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal karena hanya mengukur tingkat pengeluaran masyarakat bukan tingkat pendapatan masyarakat yang masih sangat timpang (Bariyah, 2022).

Indikator lainnya yang juga tidak kalah penting adalah pada aspek ketenagakerjaan. Tenaga kerja merupakan modal utama dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan jumlah populasi penduduk yang tinggi mempunyai modal Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mempercepat pembangunan nasional. Namun di sisi lain dengan tingginya jumlah SDM tanpa kebijakan yang tepat dapat menimbulkan problem yang serius seperti pengangguran dan kesenjangan ekonomi.

Bila mengacu definisi Badan Pusat Statistik penduduk yang termasuk ke dalam usia yang sudah bekerja adalah yang sudah berusia 15 tahun ke atas. Sementara itu jumlah angkatan kerja baik sebelum pandemi maupun pasca pandemi terus mengalami peningkatan yang stabil walaupun angkatan kerja tersebut dibagi lagi menjadi 2 kategori lagi yaitu penduduk yang bekerja dan yang masih menjadi pengangguran, namun yang patut kita apresiasi adalah jumlah pengangguran yang relatif stabil mengalami penurunan walaupun yang tetap kita harus cermati dan kritisi apakah pekerjaan tersebut berkualitas bagus sehingga mampu ikut mendorong kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1.2 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Februari 2020-Februari 2023**

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2020 (juta orang)	Februari 2021 (juta orang)	Februari 2022 (juta orang)	Februari 2023 (juta orang)
Penduduk usia kerja	202,60 juta	205,36 juta	208,54 juta	211,59 juta
Angkatan kerja	140,22 juta	139,81 juta	144,01 juta	146,62 juta
Bekerja	133,29 juta	131,06 juta	135,61 juta	138,63 juta
Pengangguran	6,93 juta	8,75 juta	8,40 juta	7,99 juta
Bukan angkatan kerja	62,38 juta	65,55 juta	64,53 juta	64,97 juta

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Dari penduduk yang bekerja tersebut didominasi oleh 3 sektor lapangan pekerjaan baik sebelum pandemi maupun pasca pandemi yaitu sektor yang pertama Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kedua sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan ketiga Industri Pengolahan. Ketiga sektor tersebut menyumbang lebih dari 50 persen dari keseluruhan sektor pekerjaan yang dilakukan dari penduduk Indonesia yang sudah bekerja.

**Tabel 1.3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Februari 2020-Februari 2023.**

Sektor Pekerjaan Utama	Februari 2020 (persen)	Februari 2021 (persen)	Februari 2022 (persenn)	Februari 2023 (persen)
Pertanian	29,23 persen	29,59 persen	29,96 persen	29,36 persen
Perdagangan Besar dan Eceran	18,58 persen	19,20 persen	19,03 persen	18,93 persen
Industri Pengolahan	14,04 persen	13,60 persen	13,77 persen	13,58 persen
Total	61,85 persen	62,39 persen	62,76 persen	61,87 persen

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja namun sayangnya sampai saat ini penduduk yang bekerja masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar

dan malah dua terendah dari penduduk yang bekerja adalah mereka yang sudah berpendidikan tinggi yaitu Universitas dan diploma I/ II/ III. Tidak heran produktivitas tenaga kerja Indonesia masih sangat tertinggal jauh. Berdasarkan data Luksemburg memiliki produktivitas tenaga kerja tertinggi di dunia, dengan 128 dolar per jam, menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Amerika Serikat 70,6 dolar per jam, Swiss dan Norwegia masing masing 69,7 dan 69,1 dolar per jam bahkan kita masih tertinggal jauh dari Negara tetangga Singapura, sementara Indonesia hanya 13,1 dolar per jam berada di urutan 107 dari 185 Negara (Ayu, 2022).

**Tabel 1.4 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Februari 2020-Februari 2023.**

Pendidikan Yang Ditamatkan	Februari 2020 (persen)	Februari 2021 (persen)	Februari 2022 (persen)	Februari 2023 (persen)
SD ke bawah	39,04 persen	37,41 persen	39,10 persen	39,76 persen
SMA	18,28 persen	18,80 persen	18,23 persen	19,18 persen
SMP	17,88 persen	18,54 persen	18,12 persen	18,24 persen
SMK	11,77 persen	12,33 persen	11,95 persen	11,31 persen
Universitas	10,23 persen	10,18 persen	9,92 persen	9,31 persen
Diploma I/ II/ III	2,80 persen	2,74 persen	2,68 persen	2,20 persen

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Problem lain dari ketenagakerjaan adalah masih mendominasinya pekerja informal di Indonesia ini menjadi sebuah problem karena selain karena upah yang lebih rendah dari pekerja formal selain itu juga kesulitan mendapat perlindungan tenaga kerja serta jaminan sosial bagi yang layak bagi pekerja informal. Menurut BPS yang dikategorikan sebagai Pekerja informal adalah mereka yang berusaha sendiri, mendapatkan dari pekerja tidak tetap, pekerja bebas pertanian dan non-pertanian, dan pekerja keluarga tidak dibayar. Sementara yang termasuk pekerja formal adalah berusaha sendiri dibantu buruh tetap dan pegawai, karyawan dan buruh yang mempunyai penghasilan tetap.

Dari data yang dikeluarkan BPS per Agustus 2023 pekerja informal sebesar 59,11 persen atau sebanyak 82,67 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2023) Angka tersebut secara konsisten bahkan jauh sebelum adanya pandemi covid 19 persentasenya lebih dari 50 persen yaitu Agustus

2017 sebesar 57,03 persen, Agustus 2018 sebesar 56,84 persen dan Agustus 2019 sebesar 55,72 persen (Badan Pusat Statistik, 2019).

Penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas pekerjaan bagi masyarakatnya sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja sehingga menciptakan kelas menengah lebih banyak. Bank Dunia menyebutkan mayoritas pekerjaan di Indonesia berkualitas rendah yaitu sebesar 66,67 persen pekerjaan tersebut seperti ojek online warung makanan dan pekerjaan sektor informal lainnya yang tidak memiliki gaji yang sesuai dengan beban kerja (Ulya, 2021).

Dampak dari rendahnya kualitas pekerjaan dan tenaga kerja di Indonesia menyebabkan upah yang diterima para tenaga kerja masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Dari data yang dikeluarkan BPS per Februari 2023 rata-rata upah tenaga kerja Indonesia berdasarkan lapangan kerja utama yaitu sebesar 2,94 juta rupiah per bulan sementara yang harus kita cermati adalah rata-rata upah tenaga kerja tertinggi ada pada sektor yang kurang menyerap tenaga kerja yaitu real estate dengan upah rata-rata 4,82 juta rupiah padahal sektor tersebut hanya menyerap 0,48 juta tenaga kerja atau 0,34 persen yang menjadi miris adalah tenaga kerja yang bekerja pada bidang pertanian rata-rata upahnya hanya sebesar 2,06 juta rupiah dan menjadi yang terendah dari seluruh sektor yang ada padahal sektor tersebut menjadi yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan 40,69 juta tenaga kerja atau 29,36 persen (Badan Pusat Statistik, 2023).

Selain kedua indikator utama kesejahteraan masyarakat tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia terbesar ke-16 di dunia berdasarkan PDB nominal, sehingga masuk ke dalam kelompok G-20, namun disisi lain memberikan fakta bahwa demokrasi Indonesia pada era reformasi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Basri, 2020).

Kita harus menghargai hal ini, tetapi perlu diingat bahwa PDB PPP bersifat total, sehingga tidak menunjukkan capaian kemakmuran ekonomi rata-rata masyarakatnya. Ini karena PDB tersebut dihasilkan oleh warga negara asing yang mayoritas akan kembali ke negara asalnya sehingga warga Indonesia tidak dapat menikmati kue tersebut.

Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara, kita memerlukan upaya tambahan. misalnya adalah membagi pendapatan nasional bruto dengan jumlah penduduk. Karena kita masih diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah, jelas kita tidak boleh berbangga diri. Per Juli 2021, Bank Dunia melaporkan bahwa Indonesia masih tergolong sebagai negara berpenghasilan menengah bawah, dengan pendapatan per kapita sebesar 4,140 USD ada peningkatan dari 3,870 USD pada tahun 2020. Namun, Indonesia masih tertinggal di Asean misalkan dengan negara tetangga Singapura yang ada diposisi teratas dengan 64,000 USD (Annur, 2022).

Agar kue ekonomi Indonesia kian meningkat menuju nomor lima dunia juga diiringi oleh peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata dan merata, Indonesia harus lebih bekerja keras lagi dan lebih cemerlang. Tidak seperti saat ini, menurut data Credit Suisse tahun 2019, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6 persen kekayaan nasional, dan sepuluh persen orang terkaya di Indonesia menguasai 74,1 persen kekayaan nasional. Ini jelas merugikan karena kekayaan orang terkaya ini berasal dari bisnis kroni karena punya jaringan dengan pengambil kebijakan strategis di bidang sumber daya alam. (Basri, 2020). Bisnis kroni sendiri adalah memperoleh kekayaan dari kedekatan dengan pemerintah pada sektor ekstraktif sumber daya alam seperti mineral dan batubara kelapa sawit kehutanan minyak serta gas bumi. Hal tersebut menimbulkan kerusakan pada lingkungan dan pada akhirnya terjadi bencana alam.

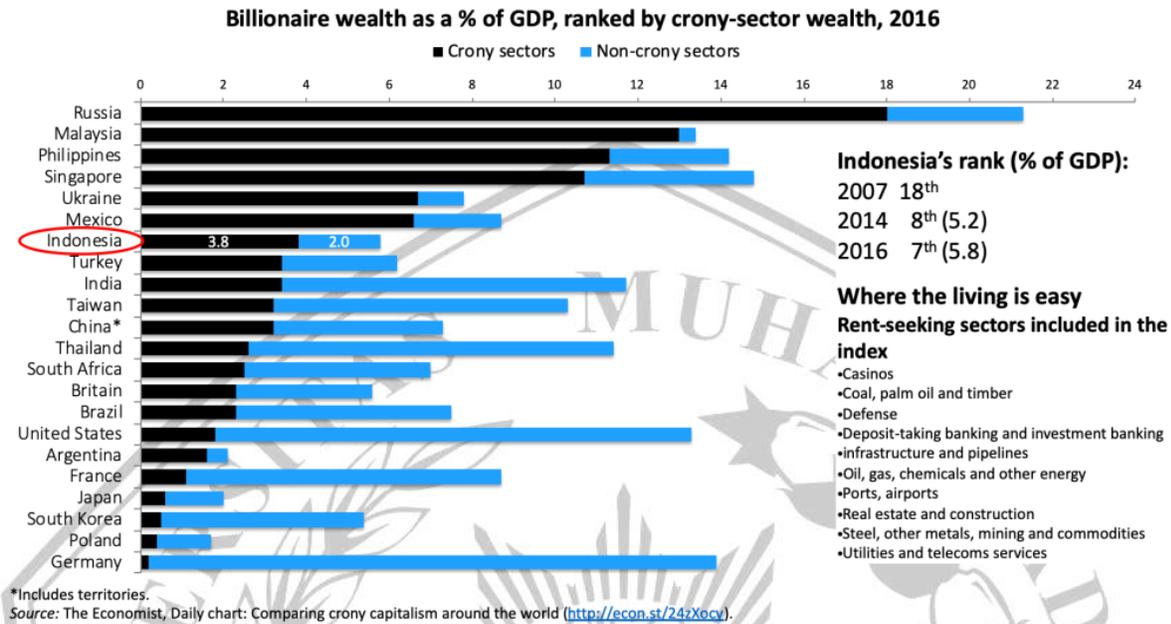
Eksplorasi terhadap sumber daya alam memang kurang menjadi perhatian para pemimpin kita terutama di era reformasi hingga sampai saat ini di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menejer kampanye pesisir dan laut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Parid Ridwanuddin menyebutkan bahwa pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang tidak menyinggung isu lingkungan dan krisis iklim serta mitigasinya menunjukkan pemerintah menutup mata terhadap dampak eksploitasi sumber daya alam dan hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi makro, padahal cukup sering terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor dampak dari adanya eksploitasi sumber daya alam berdasarkan catatan dari WALHI selama enam tahun terakhir pada 2016-2021 sudah terjadi banyak bencana alam yang tertinggi pada tahun 2020 yaitu 1.518 bencana banjir dan 1.054 bencana longsor sementara pada tahun 2021 terjadi 1.236 bencana banjir serta 595 bencana longsor (Putri, 2022).

Berdasarkan catatan dari Greenpeace menyebutkan bahwa pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo luasan lahan dalam lima tahun terakhir, deforestasi telah mencapai 2,13 juta hektare, atau setara 3,5 kali luas Pulau Bali. Deforestasi mencapai 629,2 ribu hektare pada tahun 2015-2016, 480 ribu hektare pada tahun 2016-2017, 439,4 ribu hektare pada tahun 2017-2018, 462,5 ribu hektare pada tahun 2018-2019, dan 115,5 ribu hektare pada tahun 2019. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun, luas deforestasi telah mencapai setengah dari yang terjadi pada tahun 2003-2014 (CNN, 2021).

Selain itu, data yang dikumpulkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa sekitar 8.588 izin usaha penambangan telah diberikan pada sekitar 44% daratan Indonesia. Koordinator JATAM Merah Johansyah menyatakan bahwa setiap tambang menyebabkan penderitaan warga dan kerusakan lingkungan. Contohnya, pertambangan di Halmahera, Maluku Utara, dilaporkan menghancurkan kehidupan warga karena menyebabkan polusi udara (Lumbanrau, 2021).

Industri sawit telah menghancurkan 17 juta hektar hutan Indonesia, membuat krisis iklim Indonesia, dan meminggirkan ribuan komunitas adat di seluruh Indonesia. Diakui bahwa struktur ekonomi politik sawit di Indonesia sangat rumit dan menyuburkan kelompok sawit terbesar di negara ini. Meskipun mereka mengalami peningkatan pendapatan, pekerja dan rakyat kecil yang hidup dari industri sawit hanya menikmati bagian yang sangat kecil dari kue ekonomi sawit yang besar (Simanjuntak, 2022).

# The crony-capitalism index



Dari permasalahan dan data di atas tampaklah jelas bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era reformasi terutama pasca Amandemen Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 tahun 2002 belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hanya berhasil pada tahapan prosedural elektoral semata. Memang benar bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sempurna namun sistem lain lebih banyak kelemahann dan resikonya maka dari itu demokrasi tetap harus dijaga dan diperbaharui agar mencapai tujuan hakikatnya jangan sampai kita kembali terperosok kepada dominasi eksekutif dan parlemen yang tidak menjalankan fungsinya sesuai hakikatnya oleh karena itu diperlukan penguatan kelembagaan politik dan ekonomi serta pembangunan yang inklusif (Basri, 2021).

Penelitian ini akan mengkaji tentang gagalannya demokrasi Indonesia terutama pada era reformasi terutama pasca Amandemen UUD 1945 tahun 2002 untuk mencapai tujuan sebenarnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai keadilan sosial kajian penelitian akan lebih berfokus kepada 2 hal yang kongkret yaitu pengentasan kemiskinan setengah hati dan penguatan oligarki dalam kebijakan tata kelola sumber daya alam yang akan berdampak pada ketimpangan yang semakin tinggi dan kerusakan lingkungan yang semkin tidak terkedali.

## **1.2 Rumusan Masalah**

dari latar belakang di atas, rumusan masalah penulisan ini adalah sebagai berikut:

Menngapa pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum benar benar menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama di era reformasi ini ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Menngapa pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum benar benar menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama di era reformasi ini.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Teoritis dan praktek**

Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Pemerintahan dan Politik dalam hal pentingnya demokrasi terutama di era reformasi yang diharapkan tidak hanya berhasil pada tatanan prosedural elektoral tetapi juga mencapai tujuan substantif yang sebenarnya yaitu menyejahterakan masyarakat dan keadilan sosial sesuai amanat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Adapun manfaat praktek dari penulisan ini adalah sebagai masukan tidak hanya kepada elte negeri ini tetapi juga kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga, merawat dan memperbaiki kekurangan dari perjalanan demokrasi era reformasi terutama pasca Amandemen Konstitusi UUD 1945 tahun 2002 di mana belum benar benar mampu mencapai tujuan yang substantif yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat pancasila dan UUD 1945.

## **1.5 Definisi Konseptual**

### **1.5.1 Demokrasi**

David Lechmann dalam (Mahendra, 2021) berpendapat bahwa demokrasi adalah cara politik yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin politik yang bersaing dalam mendapatkan suara pemilih. Keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin politik merupakan esensi demokrasi. Hal ini dikarenakan pemimpin politik memiliki otoritas penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Secara umum konsep dan pendekatan demokrasi prosedural adalah yang paling sering digunakan. Namun, demokrasi juga harus dipahami dalam bentuk implikasi substansialnya. Demokrasi tidak hanya dipahami melalui

hak politik untuk masyarakat, tapi juga dalam konteks hak sosial dan ekonomi (Mahendra, 2021).

### **1.5.2 Negara Kesejahteraan**

Konsep negara kesejahteraan pada dasarnya melindungi kebutuhan dasar warga negara. Ideologi kesejahteraan harus menjadi rujukan bagi pemerintah untuk menerapkannya secara efektif yang bertanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, terutama dalam hal memajukan kesejahteraan umum melalui pemberantasan kemiskinan, penerapan keadilan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup melalui penyediaan pendidikan gratis untuk semua orang (Kurniawan J Luthfi, Oman Sukmana, Abdussalam, 2015).

### **1.5.3 Partai Politik**

Partai politik, menurut Ramlan Surbakti, adalah kelompok anggota yang terorganisir, stabil, dan dipersatukan oleh ideologi tertentu yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu untuk melaksanakan kebijakan dan keputusan politik yang telah direncanakan (Surbakti, 2015).

Menurut Icshanuddin Noorsy Partai politik dalam era reformasi menurut konstitusi hasil amandemen 2002 sebagai satu satunya infrastruktur politik sayangnya berhadapan dengan realitas rendahnya tingkat kepercayaan publik akan tetapi masyarakat juga berhadapan dengan realitas bahwa tidak ada jalan lain dalam menyalurkan aspirasi politik selain melalui partai politik.

### **1.5.4 Menguatnya Oligarki dalam demokrasi Indonesia**

Winters memberikan dua definisi oligarki pertama. Pertama, dia menyatakan bahwa kekuasaan eksklusif oligarki didasarkan pada penumpukan ekstrem kekuasaan dan diperluas dengan penyebaran kekuasaan tersebut. Yang kedua adalah kekuatan kekuasaan sekelompok kecil oligarki. Masyarakat miskin terlalu tertekan oleh kekuatannya sehingga sulit untuk melepaskan diri dari cengkramannya Menurut. Winters, perbedaan kekayaan di Indonesia jauh lebih melebar antara kelompok kaya dan miskin (Febriani et al., 2021).

## **1.6 Definisi Operasional**

Dalam penulisan ini acuan yang digunakan sebagai batasan untuk menentukan masalah yang akan ditangani peneliti. Definisi operasional ini adalah sebagai berikut:

**1.6.1** Mengapa pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum benar benar menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama di era reformasi ini.

a..Pengentasan kemiskinan setengah hati: yang miskin tetap miskin dan yang kaya semakin kaya.

b. Pembajakan Demokrasi: Merugikan masyarakat dan pengabaian terhadap aspek ekologis lingkungan

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif karena penelitian ini akan menunjukkan mengapa demokrasi Indonesia pada era reformasi gagal mencapai tujuan substantifnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kualitatif diharapkan akan menghasilkan output yang menunjukkan masalah yang akan dikaji dalam penelitian (Silalahi, 2009).

### **1.7.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan Dalam penelitian ini, menggunakan studi pustaka, di mana data diperoleh dari berbagai dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini termasuk buku, jurnal, dokumen pemeritahan, dan referensi lainnya.(Nilamsari, 2014).

### **1.7.3 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses menemukan dan menata data secara rapi serta akurat dari buku, jurnal, dan sumber referensi lainnya. Analisis data kualitatif dilakukan terus menerus.sampai menemukan sesuatu hal yang akurat sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan dalam penelitian menurut (Sugiyono, 2010) tindakan yang dilakukan untuk melakukan analisis data meliputi:

a. Memilih dan memilah Data

untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemilahan dan pencarian data tambahan jika dibutuhkan setelah itu dirangkum sesuai tema penelitian serta acuan yang telah dibuat

b. Peyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan data yang telah disusun dan memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam

bentuk urut singkat, bagan, tabel, grafik, piktogram, dan format lainnya. Dengan cara ini, data dapat dipecah dengan mudah dan mudah dipahami.

c. Membuat Kesimpulan

merupakan kesimpulan yang dibuat oleh peneliti berdasarkan data yang diproses melalui pengurangan dan penampilan. Setelah mereka menarik kesimpulan, peneliti mempelajari kembali data yang digunakan untuk menghasilkan hasil penelitian mereka dan meminta berbagai pihak untuk memberikan pendapat mereka tentang apa yang mereka temukan. Hasil penelitian kualitatif menghasilkan kesimpulan baru.

